

**FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* PADA
BELANJA DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :
Afina Yura
Nim : 31402300196

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

Skripsi

FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR

Disusun Oleh :

Afina Yura

Nim : 31402300196

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 26 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Maya Indriastuti, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP.
NIK. 211406021

FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR

Disusun Oleh :
Afina Yura
Nim : 31402300196

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 26 Mei 2025

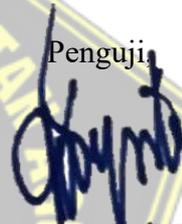
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing,



Dr. Maya Indriastuti, SE., M.Si.,
Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP.
NIK. 211406021

Penguji,



Prof. Dr. Kiryanto, S.I., M.Si., Akt., CA.
NIK. 211492004



Khoirul Fuad, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 211413023

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 26 Mei 2025

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi,



Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., PhD.
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afina Yura
NIM : 31402300196
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

“Fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 26 Mei 2025

Yang Menyatakan,



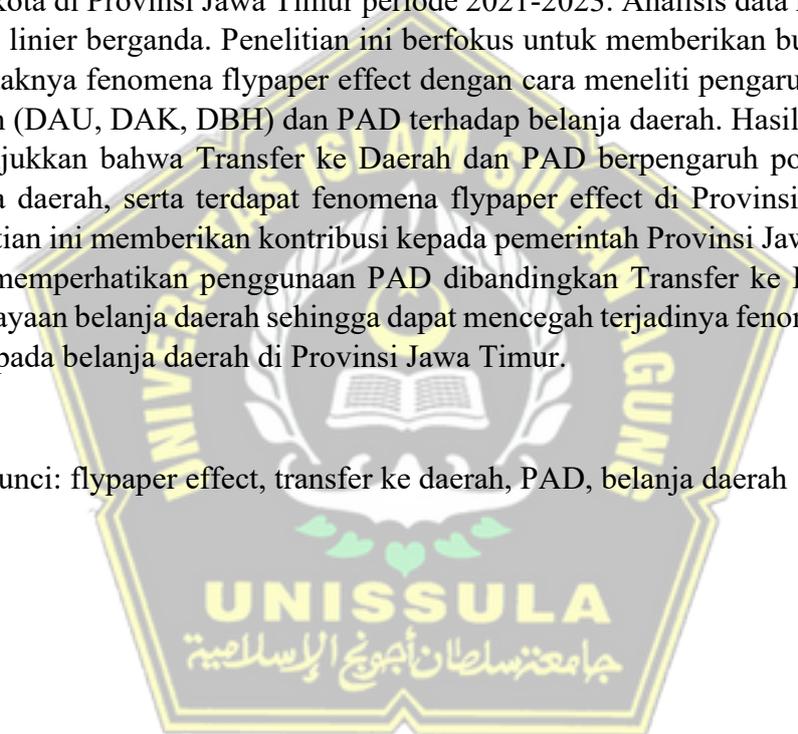
Afina Yura

NIM. 31402300196

ABSTRAK

Fenomena yang sering ditemukan di berbagai daerah di Indonesia adalah pemerintah daerah lebih banyak melakukan belanja daerah dengan dana transfer dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya yang sering dikenal dengan fenomena flypaper effect. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena flypaper effect di Provinsi Jawa Timur. Jenis data menggunakan data sekunder mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja daerah dari 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur periode 2021-2023. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Penelitian ini berfokus untuk memberikan bukti mengenai ada tidaknya fenomena flypaper effect dengan cara meneliti pengaruh Transfer ke Daerah (DAU, DAK, DBH) dan PAD terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transfer ke Daerah dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah, serta terdapat fenomena flypaper effect di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur agar lebih memperhatikan penggunaan PAD dibandingkan Transfer ke Daerah dalam pembiayaan belanja daerah sehingga dapat mencegah terjadinya fenomena flypaper effect pada belanja daerah di Provinsi Jawa Timur.

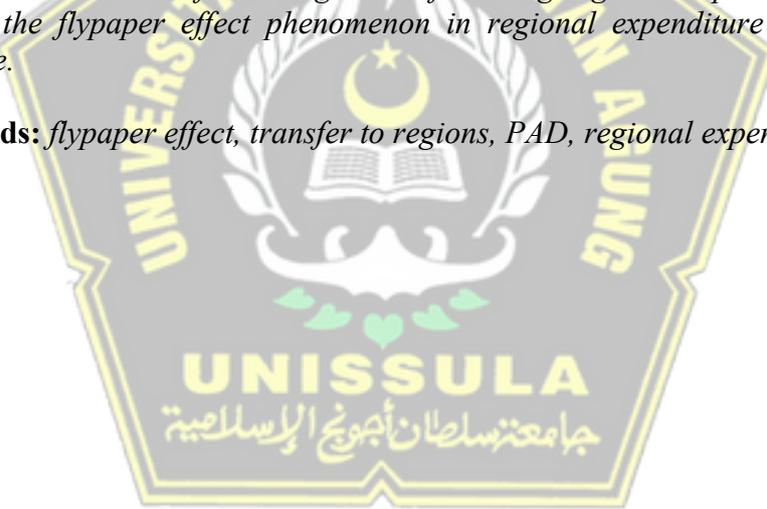
Kata kunci: flypaper effect, transfer ke daerah, PAD, belanja daerah



ABSTRACT

The phenomenon that is often found in various regions in Indonesia is that local governments make more local expenditures with transfer funds than their own revenues, which is often known as the flypaper effect phenomenon. The purpose of this study was to determine the flypaper effect phenomenon in East Java Province. The type of data uses secondary data on the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing Fund (DBH), Regional Original Income (PAD), and regional expenditure from 29 districts and 9 cities in East Java Province in the period 2021-2023. Data analysis using multiple linear regression. This study focuses on providing evidence regarding the presence or absence of the flypaper effect phenomenon by examining the effect of Transfer to Regions (DAU, DAK, DBH) and PAD on regional expenditure. The results of this study indicate that Transfer to Regions and PAD have a positive effect on regional expenditure, and there is a flypaper effect phenomenon in East Java Province. This research contributes to the government of East Java Province to pay more attention to the use of PAD than Transfer to Regions in financing regional expenditure so as to prevent the flypaper effect phenomenon in regional expenditure in East Java Province.

Keywords: *flypaper effect, transfer to regions, PAD, regional expenditure*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah.

Dalam penulisan penelitian ini, dukungan dan doa senantiasa penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, Wik Usodo dan Erawati, yang tanpa kasih sayang, pengorbanan, dan doa dari mereka, penulis tidak akan sampai pada titik ini.
2. Kakak-kakak penulis tercinta, Anggi, Azka dan Ahda, yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis baik secara moral maupun materiil.
3. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., PhD., Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Maya Indriastuti, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP, Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan dan masukan untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh dosen pengajar Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis.

7. Bu Yuri, Bu Lis, dan Mbak Ajeng selaku atasan penulis serta rekan kerja di lingkup BPKAD Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan dukungan selama berada di perkuliahan.
8. Seluruh alumni PKN STAN di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan sahabat-sahabat penulis yang mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.
9. Rekan kerja OPD yang membantu memberikan informasi dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
10. Koala, yang selalu menemani penulis dalam proses pengerjaan penelitian ini di segala waktu.

Meskipun telah dibuat dengan mengerahkan seluruh kemampuan, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sebagai dukungan yang bersifat membangun bagi penelitian ini. Penulis juga meminta maaf kepada semua pihak apabila dalam proses penyusunan penelitian ini, terdapat tindakan maupun ucapan yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh penulis.

Semarang, 25 Mei 2025

Penulis,



Afina Yura

NIM. 31402300196

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 <i>Grand Theory</i>	10
2.1.1 Teori <i>Stewardship</i>	10
2.2 Variabel Penelitian	11
2.2.1 Belanja Daerah	11
2.2.2 Transfer ke Daerah	12
2.2.3 Dana Alokasi Umum	13
2.2.4 Dana Alokasi Khusus	14
2.2.5 Dana Bagi Hasil.....	15
2.2.6 Pendapatan Asli Daerah	16

2.3	Penelitian Terdahulu	17
2.4	Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	21
2.4.1	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	21
2.4.2	Pengembangan Hipotesis.....	21
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1	Jenis Penelitian.....	27
3.2	Populasi dan Sampel	27
3.3	Sumber dan Jenis Data	28
3.4	Metode Pengumpulan Data	29
3.5	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	29
3.6	Teknik Analisis	31
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	31
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	31
3.6.3	Regresi Linier Berganda.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	38
4.2	Hasil Analisis Data.....	40
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	40
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	42
4.2.3	Regresi Linier Berganda.....	45
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	48
4.3.1	DAU terhadap Belanja Daerah.....	48
4.3.2	DAK terhadap Belanja Daerah.....	49
4.3.3	DBH terhadap Belanja Daerah	50
4.3.4	PAD terhadap Belanja Daerah.....	50
4.3.5	Flypaper Effect pada Belanja Daerah di Jawa Timur.....	51
BAB V PENUTUP		53
5.1	Simpulan	53

5.2 Implikasi.....	53
5.3 Keterbatasan.....	54
5.4 Agenda yang akan Datang	54
DAFTAR PUSTAKA	55



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1	: Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	29
Tabel 3.2	: Pengambilan Keputusan Autokorelasi	33
Tabel 3.3	: <i>Flypaper Effect and Implication</i>	36
Tabel 4.1	: Seleksi Kriteria Sampel Penelitian	38
Tabel 4.2	: Daftar Sampel.....	39
Tabel 4.3	: Analisis Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 4.4	: Hasil Uji Multikolinieritas.....	43
Tabel 4.5	: Hasil Uji Autokorelasi.....	45
Tabel 4.6	: Hasil Uji F	45
Tabel 4.7	: Hasil Uji Koefisien Determinasi	46
Tabel 4.8	: Hasil Uji-t.....	47
Tabel 4.9	: <i>Flypaper Effect</i> dan Implikasinya	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Realisasi Provinsi Jawa Timur TA 2021 – 2023.....	5
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Teoritis	21
Gambar 4.2 : Hasil Uji Normalitas	42
Gambar 4.3 : Hasil Uji Heterokedastisitas.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak otonomi daerah dimulai pada tahun 2001, pembagian urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pelimpahan kewenangan dalam mengelola anggaran daerah. Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah tersebut menyebabkan daerah mampu mengelola keuangannya sendiri dan untuk mendukung hal tersebut, dilakukan penyaluran dana transfer dari pusat ke daerah. Hal ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menggunakan dana tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.

Adanya otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah tidak hanya berwenang mengatur anggarannya saja, tetapi juga alokasi belanjanya. Belanja daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 merupakan anggaran tahunan yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah, kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan belanja daerah meliputi seluruh kewajiban yang diakui oleh daerah sebagai pengurang kekayaan bersih sepanjang tahun anggaran yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik memiliki masalah alokasi anggaran, khususnya di mana menempatkan jumlah dana yang dialokasikan untuk

setiap program. Pemerintah daerah harus dapat menggunakan uang yang mereka terima untuk investasi daerah yang berharga karena mereka memiliki sumber daya yang terbatas. Klaim bahwa pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk belanja daerah daripada untuk belanja rutin memberikan kredibilitas pada hal ini (Felix, 2012). Kejadian yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dan negara lain, dimana alokasi belanja yang tinggi tidak hanya didanai oleh pendapatan daerah, namun juga transfer dari pusat.

Sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah tidak akan terwujud tanpa adanya dana transfer. Dalam kerangka desentralisasi fiskal Indonesia, kebijakan transfer dilaksanakan untuk mengurangi ketimpangan keuangan yang terjadi antara pemerintah daerah (keseimbangan keuangan horizontal) dan antara pemerintah pusat dan daerah (keseimbangan keuangan vertikal). Tujuan akhir dari transfer ini adalah untuk menjamin pemerataan akses terhadap layanan publik.

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bentuk transfer dari pusat ke daerah melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD). Jika DBH ditujukan untuk menanggulangi kelistrikan vertikal, maka DAU ditujukan untuk menanggulangi kelistrikan horizontal yang juga diakibatkan oleh penyaluran DBH. Sebaliknya, DAK lebih menitikberatkan pada penetapan prioritas nasional untuk mendukung bidang-bidang tertentu. DAK merupakan transfer bersyarat, sedangkan DBH dan DAU digunakan dalam bentuk hibah blok atau transfer tak bersyarat. Karena alokasi DAU dan DBH merupakan dana transfer tanpa syarat, daerah diberi kewenangan untuk menggunakannya tanpa campur tangan pusat

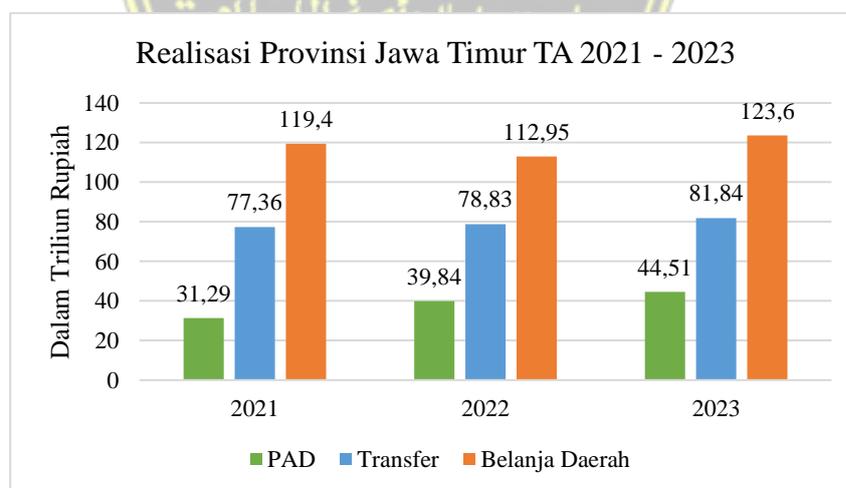
Pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan otonomi daerah yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari transfer ke daerah. PAD didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang bersifat khusus, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. PAD dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan desentralisasi dan potensi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah sangat dipengaruhi atau bergantung pada sumber PAD.

Rahmat (2011) menegaskan bahwa daerah yang memiliki PAD dan Dana Perimbangan yang besar memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pelaksanaan kewajiban pemerintahan, inisiatif pembangunan, serta pelayanan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah daerah terlalu bergantung pada transfer pemerintah untuk membiayai belanja daerah daripada memaksimalkan potensi daerahnya, yang menjadi permasalahan dalam pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana transfer (Armawaddin, 2015). Flypaper effect menggambarkan situasi di mana pemerintah daerah menunjukkan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat tanpa batasan.

Ketika pemerintah daerah lebih mengandalkan transfer ke daerah daripada PAD-nya sendiri, maka kondisi ini disebut sebagai flypaper Effect. Menurut penelitian, pemerintah daerah cenderung membuang-buang belanja daerah ketika

mereka menggunakan lebih banyak hibah atau transfer tanpa syarat daripada yang mereka gunakan untuk PAD mereka (Friyani, 2017). Secara implisit, efek flypaper ini mempunyai sejumlah dampak terhadap belanja daerah, antara lain menimbulkan kesenjangan fiskal, menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan sumber-sumber penghasil pertumbuhan PAD, meningkatnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, menimbulkan reaksi berlebihan terhadap pemanfaatan dana transfer, dan menurunnya kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota terkait (Walidi, 2009).

Menurut Harefa, et al. (2017), sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia menghadapi masalah umum terkait kontribusi PAD yang relatif terbatas terhadap Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal pembiayaan daerah. Dengan kata lain, komposisi APBD masih didominasi oleh peran dan kontribusi penerimaan dari transfer ke daerah. Begitu pula dengan struktur APBD Provinsi Jawa Timur yang masih lebih condong pada transfer ke daerah, seperti tampak pada grafik berikut.



Gambar 1.1 Realisasi Provinsi Jawa Timur TA 2021 – 2023

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi PAD Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan masih jauh lebih kecil dibandingkan besarnya Transfer ke Daerah yang diterima. Namun demikian, realisasi PAD Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2021 sampai 2023 memiliki tren yang cenderung mengalami kenaikan. Realisasi Transfer ke Daerah Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir juga mengalami kenaikan, dengan *gap* nilai yang cukup tinggi dibandingkan realisasi PAD. Sementara itu realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung berfluktuasi menyesuaikan sumber pendapatan.

Semakin besar rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin besar pula kemandirian daerah (DJPB, 2023). Rasio kemandirian daerah Jawa Timur pada tahun 2023 sebesar 35,04%, tertinggi di sepanjang periode lima tahun terakhir. Disisi lain, semakin tinggi angka rasio transfer terhadap total pendapatan, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dalam mendanai belanja daerah. Rasio ketergantungan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 tercatat sebesar 64,43%, artinya pendapatan Provinsi Jawa Timur masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Namun, tingkat ketergantungan ini mengalami perbaikan di mana merupakan angka terbaik (terkecil) di sepanjang periode 2020 – 2023. Pada tahun 2023, TKD berkontribusi sebesar 77,21% pada total penerimaan APBD di Provinsi Jawa Timur, hal ini menunjukkan ketergantungan daerah terhadap penyaluran TKD ini masih cukup besar, sehingga harus memperkuat penerimaan dari PAD, dan Pendapatan Daerah Lainnya (DJPB, 2024).

Seluruh pendapatan daerah pada dasarnya menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah dalam hal pengelolaannya. Secara teoritis, dana TKD seharusnya dimanfaatkan secara optimal, yaitu dengan prinsip efektivitas dan efisiensi, guna mendukung peningkatan standar pelayanan publik minimal. Penggunaan dana tersebut juga diharapkan dapat disajikan secara transparan dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, TKD sering menjadi sumber pembiayaan utama bagi kegiatan operasional rutin pemerintah daerah, yang kemudian dilaporkan dalam perhitungan APBD oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan Provinsi Jawa Timur rentan terkena oleh fenomena *flypaper effect*.

Penelitian oleh Wahab (2021) menyatakan bahwa dana transfer dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah kota Jayapura, tetapi tidak membuktikan terkait ada atau tidaknya fenomena *flypaper effect* disana. Muthmainah & Wakhid (2018) menyatakan bahwa terjadi fenomena yang sama di Provinsi Bali dan Nusra, tetapi sampel yang diteliti hanya kabupaten dengan sektor utama pariwisata. Disisi lain, Tribudhi, *et al.* (2020) menyatakan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah serta terjadi fenomena *flypaper effect* di Jawa Tengah, namun tidak menjelaskan variabel lain yang berperan dalam fenomena tersebut.

Dengan beberapa pengecualian, penelitian ini merupakan replikasi dan perluasan dari penelitian sebelumnya. Pertama, yakni terdapat tambahan variabel independen yang digunakan. Penelitian ini melengkapi variabel independen dalam bentuk DAU, DAK, DBH, dan PAD, sedangkan penelitian sebelumnya sering kali hanya menggunakan dana transfer dan PAD. Kedua, penelitian ini membuktikan terjadinya fenomena *flypaper effect*, sedangkan sejumlah penelitian sebelumnya

hanya melihat hubungan antara faktor-faktor tanpa membahas fenomena itu sendiri. Ketiga, penelitian ini menggunakan data pada Provinsi Jawa Timur, yang menjadi salah satu dari tiga daerah dengan APBD terbesar se-Indonesia, serta pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai daerah dengan Realisasi PAD tertinggi kelima nasional sebesar 107,48 persen dan realisasi belanja tertinggi ke-10 nasional sebesar 94,02 persen. Sehingga berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian berjudul **“Fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Alokasi Transfer ke Daerah dalam APBN terus meningkat setiap tahun. Fakta ini mengharuskan pemerintah dengan mengevaluasi pencapaian tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pada praktiknya, Transfer ke Daerah seringkali dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang dilaporkan dan diperhitungkan pada APBD. Ketergantungan pada Transfer ke Daerah menyebabkan kurangnya penggunaan PAD untuk belanja operasional pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh Transfer ke Daerah (DAU, DAK, DBH) dan PAD terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur?
- 2) Bagaimana fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah?
- 2) Apakah DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah?
- 3) Apakah DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah?
- 4) Apakah PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah?
- 5) Apakah terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah di Provinsi Jawa Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini adalah menguji secara empiris dan menganalisis:

- 1) Pengaruh Transfer ke Daerah (DAU, DAK, DBH) dan PAD terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur.
- 2) Fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah di Provinsi Jawa Timur.

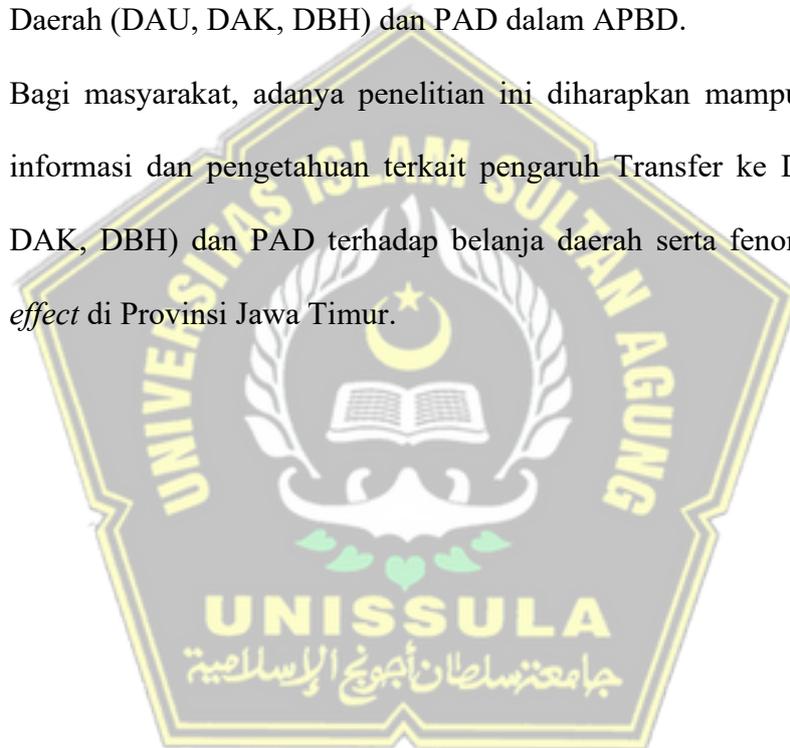
1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah. Kemudian diharapkan mampu memberikan wawasan terkait teori dan praktik yang terjadi, serta dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

- (1) Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari hasil penelitian ini harapannya bisa digunakan untuk optimalisasi sumber dana guna efektivitas belanja, serta sebagai bahan masukan untuk bisa mengembangkan strategi, kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan sumber dana untuk belanja daerah serta memacu efektivitas penggunaan Transfer ke Daerah (DAU, DAK, DBH) dan PAD dalam APBD.
- (2) Bagi masyarakat, adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan terkait pengaruh Transfer ke Daerah (DAU, DAK, DBH) dan PAD terhadap belanja daerah serta fenomena *flypaper effect* di Provinsi Jawa Timur.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori *Stewardship*

Asumsi konseptual yang mendasari teori pengelolaan mencakup bahwa manusia pada dasarnya jujur, terintegrasi, dapat dipercaya, dan mampu bertindak secara bertanggung jawab. Menurut Davis et al. (1997), landasan psikologis dan sosiologis teori pengelolaan dimaksudkan untuk menjelaskan peran manajer sebagai pengelola, pelayan, dan agen. Teori *stewardship*, adalah teori yang menjelaskan kondisi manajemen yang lebih berfokus pada hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi atau yang lebih peduli dengan kepentingan prinsipal daripada didorong oleh tujuan dan kepentingan pribadi. Karena pengelola bekerja untuk mencapai tujuan organisasi, maka perilaku pengelola tidak akan menyimpang dari tujuan awal.

Merujuk teori *stewardship*, dalam kasus ini pemerintah daerah berperan sebagai *steward*, masyarakat adalah pemilik, organisasi adalah negara, dan tujuan organisasi adalah negara yang menyejahterakan masyarakat. Pemerintah daerah selaku *steward* akan berperilaku sesuai kepentingan bersama, dimana ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama alih-alih menentangnya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, ada tanggung jawab pemerintah untuk mengoptimalisasikan belanja sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Karena *steward* lebih fokus pada upaya untuk mencapai

tujuan organisasi, mereka percaya bahwa kepentingan bersama dan bertindak sesuai dengan perilaku pemilik merupakan faktor yang wajar. Menurut gagasan pengurus ini, kebahagiaan pemilik dan keberhasilan organisasi saling terkait erat. Fungsi tersebut akan berjalan dengan baik karena pengurus akan menjaga dan mengoptimalkan kekayaan organisasi sambil memberikan kinerja terbaik mereka.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban daerah yang dicatat sebagai pengurang kekayaan bersih pada rentang tahun anggaran yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semua belanja kas daerah yang mengurus aset sehingga menjadi beban daerah termasuk dalam kategori belanja daerah dalam APBD. Metode penganggaran kinerja yang menitikberatkan pada pencapaian hasil dari masukan yang direncanakan menjadi landasan penyusunan belanja daerah. Prioritas penyusunan belanja daerah diberikan dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga dapat melaksanakan tugas daerahnya.

Pemerintah harus memperhatikan konsep pengelolaan belanja daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan tugas pengawasan belanja daerah. Dengan mengalokasikan dan menggunakan sumber daya secara tanggap, efektif, dan efisien, pengelolaan belanja daerah membantu pemerintah dalam memenuhi

tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan publik. Tiga tujuan utama manajemen pengeluaran daerah adalah untuk memberikan layanan publik yang efektif, mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas pemerintah, dan menjaga pengendalian fiskal secara keseluruhan (Allen & Tommasi, 2001).

Beban pengeluaran daerah diperkirakan dan didistribusikan secara adil dan merata sehingga semua kelompok masyarakat dapat memperoleh manfaat darinya dengan cara yang sebanding, bebas dari prasangka, terutama dalam hal penyediaan layanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, belanja daerah digunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Urusan tersebut meliputi urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan khusus bidang yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah atau yang disebut juga dengan TKD merupakan dana yang berasal dari APBN dan menjadi bagian dari belanja negara yang dianggarkan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dengan baik dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah adalah melalui dana ini yang bertujuan

untuk mengelola urusan daerah dan meringankan sejumlah tanggung jawab pemerintah pusat.

Pemerintah pusat memberikan hibah tanpa syarat kepada pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan contoh transfer tanpa syarat. Selain itu, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangan tambahan seperti PAD, pembiayaan, dan pendapatan lainnya.”

2.2.3 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen TKD yang secara khusus dirancang untuk memperkecil kesenjangan antardaerah dalam hal pelayanan publik dan kemampuan keuangan. Karena DAU merupakan Dana Alokasi Umum, maka pemanfaatannya kepada daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus dalam rangka menegakkan otonomi daerah. Belanja rutin, khususnya gaji pegawai pemerintah daerah, mencakup lebih dari 80% DAU yang dikelola daerah.

Secara umum, DAU berperan sebagai komponen pemerataan kapasitas fiskal. Celah fiskal satu tahun anggaran, yaitu selisih antara kebutuhan keuangan daerah dengan potensi pendapatan daerah, digunakan untuk menentukan alokasi DAU di setiap daerah. Keharusan untuk membayar pegawai negeri sipil, termasuk

PNS dan PPPK, menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam kebutuhan anggaran daerah. Anggaran DAU yang cenderung terbatas akan diberikan kepada daerah yang memiliki potensi keuangan yang besar tetapi kebutuhan keuangannya minimal. Sebaliknya, alokasi DAU yang relatif besar akan diberikan kepada daerah yang memiliki kebutuhan keuangan yang besar tetapi potensi keuangannya kecil.

2.2.4 Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendukung operasionalisasi pelayanan publik yang penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah dan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan prioritas nasional tertentu. DAK sendiri terdiri dari DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah kepada Daerah.

DAK merupakan sumber pendanaan utama untuk pembangunan prasarana dan sarana fisik. DAK digunakan untuk mempersempit kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan mengutamakan bidang pendidikan, kesehatan, prasarana, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Untuk membiayai kegiatan daerah tertentu yang menjadi program prioritas nasional, DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu. Daerah dapat memperoleh DAK apabila memenuhi tiga persyaratan, yaitu persyaratan umum berdasarkan indeks fiskal neto, persyaratan khusus berdasarkan

ciri dan ketentuan daerah, dan persyaratan teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait.

DAK termasuk dalam APBD, namun dalam pemanfaatannya pemerintah daerah harus mengikuti ketentuan dari pusat. Karena pemerintah daerah memfokuskan belanja APBD pada kebutuhan pegawai, DAK sangat penting untuk pengembangan berbagai bidang. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan jika DAK yang secara khusus diperuntukkan untuk pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana fisik tersebut dikelola dengan baik.

2.2.5 Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan komponen TKD yang dibagikan kepada daerah penghasil dalam rangka mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada daerah bukan penghasil lainnya dalam rangka mengatasi eksternalitas negatif dan/atau menambah pemerataan di suatu daerah. DBH didasarkan pada persentase penerimaan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu. Dengan mempertimbangkan potensi daerah penghasil, DBH bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah.

DBH bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam, seperti kehutanan, mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan, serta dana bagi hasil perpajakan (pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil

tembakau). Pada hakikatnya, DBH dialokasikan berdasarkan pendekatan asal daerah (daerah penghasil). Pembagian DBH ditentukan berdasarkan realisasi penerimaannya. Realisasi penerimaan tahun sebelumnya menjadi dasar penetapan pagu DBH. Pembagian DBH sesungguhnya ditetapkan dengan menggunakan bobot 90% berdasarkan masing-masing bidang usaha daerah penghasil dan proporsi pembagian keuntungan, dan 10% berdasarkan kinerja pemerintah daerah.

2.2.6 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang bersifat khusus, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka memberdayakan daerah yang terdesentralisasi, PAD dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengkaji dana penyelenggaraan otonomi daerah.

Seiring dengan komposisi PAD, potensi pemerintah daerah untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar semakin meningkat. Namun, ketergantungan kepada pusat semakin meningkat karena porsi PAD terhadap pendapatan daerah semakin berkurang. Sementara itu, masyarakat diuntungkan dengan lancarnya pembangunan akibat meningkatnya pendapatan PAD. Pembangunan meliputi berbagai bidang, seperti pembangunan infrastruktur publik, jalan, dan berbagai layanan lainnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang mendukung tersusunnya penelitian:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel, Sampel, dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Muthmainah, & Wakhid A. (2018)	<p>Variabel Independen X1 : DAU X2 : DAK X3 : DBH X4 : PAD</p> <p>Variabel Dependen Y : Belanja Daerah</p> <p>Sampel : 37 Kabupaten dan 4 Kota yang tidak mengalami pemekaran tahun 2012-2016 Alat Analisis: Regresi linier berganda melalui SPSS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DAU, DAK, DBH dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah - Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah > PAD terhadap Belanja Daerah sehingga terjadi fenomena <i>Flypaper Effect</i> di Kabupaten / Kota di Pulau Bali dan Nusra
2	Wahab, L. O. A. (2021)	<p>Variabel Independen X1 : PAD X2 : Dana Transfer</p> <p>Variabel Dependen Y : Belanja Daerah</p> <p>Sampel : Pemerintah Kota Jayapura Alat Analisis: Regresi linier berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PAD berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura. - Dana transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura. - PAD dan dana transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Jayapura
3	Yulina, <i>et al.</i> (2017)	<p>Variabel Independen X1 : DBH X2 : DAU X3 : DAK X4 : PAD</p> <p>Variabel Dependen Y : Belanja Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DBH, DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah - Terjadi <i>flypaper effect</i> dimana sumber penerimaan DAU terbesar yang mempengaruhi besarnya belanja pada tahun berikutnya

		<p>Sampel : 17 Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Alat Analisis: Regresi linier berganda (model ekonometrika) dengan program <i>E-views 9</i></p>	
4	Urip, T. P., Indahyan, R. (2017).	<p>Variabel Independen X1 : Dana Perimbangan X2 : PAD</p> <p>Variabel Dependen Y : Belanja Daerah</p> <p>Sampel : Kota Jayapura Alat analisis: regresi berganda, analisis efisiensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap BD - PAD berpengaruh terhadap BD - Tidak terjadi Fenomena <i>flypaper effect</i> dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura
5	Tribudhi, <i>et al.</i> (2020)	<p>Variabel Independen X1 : DAU X2 : PAD</p> <p>Variabel Dependen Y : Belanja Daerah</p> <p>Sampel : data tahun 2014-2017 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah Alat analisis: regresi data panel dan uji t</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. - Masih terdapat <i>flypaper effect</i>.
6	Meiriana, <i>et al.</i> (2024)	<p>Variabel Independen X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK X4 : Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen Y : Belanja Daerah</p> <p>Sampel : Kab/Kota Provinsi Jawa Timur TA 2016 – 2022 Alat analisis : regresi data panel dan diolah dengan <i>E-views</i></p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Perimbangan (DP) memiliki dampak yang positif signifikan terhadap belanja daerah</p>
7	Amalia, <i>et al.</i> (2015)	<p>Variabel Independen X1 : PAD X2 : DAU X2 : DAK</p> <p>Variabel Dependen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PAD tidak mempengaruhi pengeluaran pemda - DAU mempengaruhi pengeluaran pemda - DAK mempengaruhi pengeluaran pemda

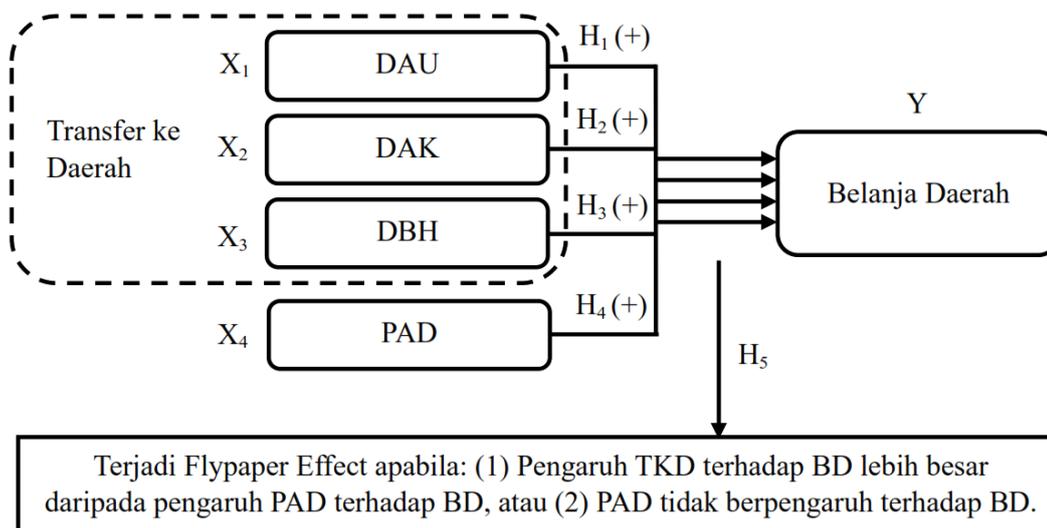
		<p>Y : Pengeluaran Pemerintah Daerah/Belanja Daerah</p> <p>Sampel : data tahun 2009 – 2013 dari 12 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan</p> <p>Alat analisis : analisis regresi linear menggunakan SPSS</p>	<p>- Koefisien DAU dan DAK > PAD, dan keduanya secara signifikan mempengaruhi pengeluaran pemda. Artinya terjadi <i>flypaper effect</i> pengeluaran pemda.</p>
8	Nurdini, <i>et al.</i> (2015).	<p>Variabel Independen X1 : DAU X2 : DBH X2 : PAD</p> <p>Variabel Dependen Y : Pengeluaran Pemerintah Daerah/Belanja Daerah</p> <p>Sampel : 26 kabupaten/kota di Jawa Barat</p> <p>Alat analisis : analisis regresi linear menggunakan SPSS</p>	<p>- DAU, DBH dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah</p> <p>- DAK tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah</p> <p>- DAU, DAK, dan DBH secara simultan > PAD terhadap belanja daerah, maka dinyatakan telah terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> terhadap belanja daerah.</p>
9	Fahrizal, M., & Sukartini, N. (2024)	<p>Variabel Independen X1 : DAU X2 : DAK X3 : DBH X4 : Otsus</p> <p>Variabel Dependen Y1 : Belanja Modal Y2 : Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Sampel : Kabupaten/Kota Aceh Tahun 2007 - 2020</p> <p>Alat Analisis: regresi linier berganda</p>	<p>- Terhadap belanja modal, terjadi <i>flypaper effect</i> pada DAU namun tidak terjadi pada ketiga dana transfer yang lain.</p> <p>- Terhadap belanja barang dan jasa tidak menunjukkan adanya <i>flypaper effect</i> pada ke-empat dana transfer.</p> <p>- Dana Otsus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang jasa.</p>
10	Fadilah, H., Helmayunita, N. (2020)	<p>Variabel Independen X1 : DAU X2 : DAK X3 : PAD</p> <p>Variabel Dependen Y : Belanja Daerah</p> <p>Sampel : 34 Provinsi di Indonesia</p>	<p>- DAU, DAK dan PAD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.</p> <p>- DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.</p> <p>- Koefisien Dana Perimbangan > koefisien PAD, artinya terdapat <i>flypaper effect</i> terhadap</p>

		Alat Analisis: regresi linier berganda	pemerintah provinsi di Indonesia.
11	Indrasari, A., & Kholvieyana, R. (2020)	Variabel Independen X1 : PAD X2 : DAU Variabel Dependen Y : BD Sampel : 36 Kota di Riau Alat Analisis: Regresi linier berganda memakai SPSS	Pengaruh DAUt terhadap BDt > pengaruh PADt terhadap BDt, terjadi <i>flypaper effect</i>
12	Lestari <i>et al.</i> (2016)	Variabel Independen X1 : PAD X2 : DAU Variabel Dependen Y1 : Belanja Modal Y2 : Kemandirian Daerah Sampel : Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Alat Analisis: Regresi linier berganda memakai SPSS	- DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal - DAU, PAD, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
13	Santoso, <i>et al.</i> (2015)	Variabel Independen X1 : PAD X2 : DBH X3 : DAU Variabel Dependen Y : Belanja Daerah Sampel : Kab/Kota Provinsi Lampung Alat Analisis: Regresi linier berganda memakai SPSS	- DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah - DBH tidak berpengaruh terhadap belanja daerah - Terjadi <i>flypaper effect</i>

Sumber: Diolah penulis

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Sumber: Diolah penulis

2.4.2 Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini berdasarkan teori *stewardship* yang menekankan pentingnya hubungan antara manajer (pemerintah daerah) dan pemilik organisasi (masyarakat). Penelitian ini menunjukkan situasi pemerintah daerah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat salah satunya dengan berusaha menunjukkan tanggung jawab atas kinerjanya yang baik dengan mengelola sumber daya daerah yang dipercayakan kepadanya, anggaran keuangan yang besar, serta aspirasi-aspirasi yang diberikan masyarakat. Dengan motivasi atas kepentingan bersama itulah pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan, melayani masyarakat dengan optimal sesuai dengan visi misi pemerintah daerah, serta meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.

2.4.2.1 DAU Terhadap Belanja Daerah

Salah satu dari jenis Transfer ke Daerah adalah DAU. Tingkat kemandirian suatu daerah ditentukan oleh besarnya DAU yang diperoleh pemerintah daerah (Hairiyah *et al.*, 2017). Oleh karena itu, apabila suatu daerah memperoleh DAU dengan pendapatan yang tinggi, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemandiriannya masih rendah atau belum dapat dikatakan sebagai daerah otonom berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022.

Teori *stewardship* dalam hal ini yakni peran pemerintah daerah tidak sekedar menerima DAU saja, melainkan menggunakannya sebagai katalis pembangunan menuju kemandirian. *Steward* harus kritis dalam mentransformasi ketergantungan, dimana pemerintah daerah sebagai pengelola harus mengoptimalkan penggunaan DAU ini demi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Lestari *et al.* (2016) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa DAU pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal serupa dengan sampel berbeda dinyatakan dalam penelitian Meiriana, *et al.* (2024), Fahrizal & Sukartini (2024), Fadilah & Helmayunita (2020), Tribudhi, *et al.* (2020), Indrasari & Kholvieyana (2020), Muthmainah & Wakhid (2018), Yulina, *et al.* (2017), Amalia, *et al.* (2015), Nurdini *et al.* (2015), serta Santoso *et al.* (2015). Penelitian ini mengajukan hipotesis DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Artinya semakin besar DAU maka akan semakin tinggi belanja daerah dan sebaliknya.

H₁: DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

2.4.2.2 DAK terhadap Belanja Daerah

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas daerah tertentu sesuai dengan arahan teknisnya, disesuaikan dengan prioritas nasional, dan didanai oleh pendapatan APBN. Selain itu, undang-undang mengamanatkan agar Dana Pendamping DAK dialokasikan paling sedikit 10% dari seluruh alokasi DAK yang diterima oleh daerah penerima DAK dalam APBD-nya.

Sejalan dengan *teori stewardship*, peran pemerintah daerah disini harus mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program lokal serta mengoptimalkan alokasi dana sesuai kebutuhan strategis. DAK bukan sekadar mekanisme transfer dana, melainkan instrumen strategis pembangunan daerah yang harus diterapkan secara transformatif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

Amalia *et al.* (2015) memberikan simpulan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal serupa dengan sampel berbeda dinyatakan dalam penelitian Meiriana, *et al.* (2024), Muthmainah & Wakhid (2018), serta Yulina, *et al.* (2017). Sementara itu, berbeda dengan Fadilah & Helmayunita (2020) dan Nurdini *et al.* (2014), yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah DAK memiliki dampak positif terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena semakin besar DAK yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka semakin banyak pula dana yang tersedia untuk belanja daerah.

H₂ : DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

2.4.2.3 DBH terhadap Belanja Daerah

Dalam rangka mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah, DBH bersumber dari penerimaan APBN tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan alokasi yang ditetapkan dengan rumusan persentase tertentu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Selain itu, DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Merujuk teori *stewardship*, peran pemerintah daerah sebagai *steward* disini adalah untuk mengoptimalkan kekayaan dan sumber daya yang dimiliki demi kepuasan bersama. *Steward* tidak hanya menerima dan menggunakan DBH, tetapi mentransformasikannya menjadi modal pembangunan berkelanjutan.

Yulina, *et al.* (2017) memberikan simpulan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal serupa dengan sampel berbeda dinyatakan dalam penelitian Muthmainah & Wakhid (2018), Yulina, *et al.* (2017), serta Nurdini *et al.* (2015). Di sisi lain, Santoso *et al.* (2015) menghasilkan simpulan bahwa DBH berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah DBH memiliki dampak positif terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena semakin besar DBH yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka semakin banyak pula dana yang tersedia untuk belanja daerah.

H₃ : DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

2.4.2.4 PAD terhadap Belanja Daerah

PAD merupakan salah satu komponen biaya belanja daerah, sehingga apabila PAD tinggi maka belanja daerah juga tinggi karena kebutuhan belanja daerah semakin besar. Semakin besar PAD yang diterima pemerintah daerah, maka semakin besar pula kemungkinan daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri dan tidak bergantung pada dana yang disediakan oleh pemerintah pusat, hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonom (Hairiyah *et al.*, 2017).

Sejalan dengan teori *stewardship*, disini peran *steward* harus mampu memaksimalkan potensi dan inovasi untuk meningkatkan PAD. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana dari pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak sekadar mengelola pendapatan, tetapi membangun ekosistem pembangunan mandiri yang berkelanjutan.

Muthmainah dan Wakhid (2018) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Begitu juga dengan penelitian serupa dengan sampel berbeda dari Wahab (2020), Urip & Indahyani (2017), serta Lestari, *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah PAD memiliki dampak positif terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena semakin besar PAD yang dihasilkan pemerintah daerah, maka semakin banyak pula dana yang tersedia untuk belanja daerah.

H₄ : PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

2.4.2.5 *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur

Flypaper effect merupakan kondisi yang menunjukkan belanja daerah lebih bergantung terhadap TKD daripada PAD. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di beberapa negara lain seperti Meksiko (Cardenas & Sharma, 2011). *Flypaper effect* membawa implikasi yakni meningkatnya belanja daerah dibandingkan TKD itu sendiri serta kecenderungan untuk menanti bantuan dari pusat dibanding mengelola sumber daya daerah sendiri.

Hubungan teori *stewardship* dalam hal ini adalah terkait peran *steward* sebagai pengelola keuangan, yang seharusnya tidak hanya sekadar penerima transfer, namun juga bisa memaksimalkan PAD. Hal ini akan merubah paradigma di mana belanja daerah tidak lagi dipandang sebagai realisasi atas bantuan, tetapi sebagai instrumen strategis pemberdayaan dan bentuk kemandirian.

Flypaper effect terjadi pada 34 Provinsi di Indonesia (Fadilah dan Helmayunita, 2020). Hal serupa dengan sampel berbeda dinyatakan oleh Tribudhi, *et al.* (2020), Indrasari & Kholviyana (2020), Muthmainah & Wakhid (2018), Yulina, *et al.* (2017), Amalia, *et al.* (2015), Nurdini *et al.* (2015), serta Santoso *et al.* (2015). Sementara itu, Fahrizal dan Sukartini (2024) menyatakan bahwa *flypaper effect* tidak terjadi pada belanja daerah di Provinsi Aceh. Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah di Provinsi Jawa Timur. Hal ini karena pengaruh TKD terhadap belanja daerah lebih besar dari pengaruh PAD terhadap belanja daerah.

Hs: Terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah di Provinsi Jawa Timur

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Karena dalam penelitian ini telah dilakukan uji hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Berdasarkan asas positivisme, penelitian kuantitatif menggunakan alat pengumpulan data secara acak dan analisis statistik (Sugiyono, 2018). Untuk mengetahui apakah fenomena *flypaper effect* benar-benar terjadi, maka penelitian ini melihat bagaimana variabel bebas DAU, DAK, DBH, dan PAD mempengaruhi variabel terikat, yaitu belanja daerah.

Tujuan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah DAU, DAK, DBH, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, dilakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa fenomena *flypaper effect* benar-benar terjadi. Menurut Sekaran dan Bougie (2016), pengujian hipotesis merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memperjelas sejumlah hubungan dan antar variabel yang mempengaruhi.

3.2 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2018) mendefinisikan populasi sebagai domain generalisasi yang terdiri dari item atau orang dengan atribut dan sifat tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan selanjutnya. Populasi penelitian ini terdiri dari

seluruh 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur. Alasan pemilihan data karena melihat bahwa Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan Transfer ke Daerah secara rutin dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, ia menjadi salah satu dari tiga daerah dengan APBD terbesar se-Indonesia, serta pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan Kemendagri sebagai daerah dengan realisasi PAD tertinggi kelima nasional sebesar 107,48 persen dan realisasi belanja tertinggi ke-10 nasional sebesar 94,02 persen.

Sementara itu sampel menurut Sugiyono (2018) ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini digunakan teknik *purposive* sampling. Teknik *purposive* sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas suatu pertimbangan, seperti ciri-ciri atau sifat-sifat suatu populasi. Sampel pada penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan kriteria yakni data keuangan APBD kabupaten/kota yang terpublikasikan dalam kurun waktu 2021 – 2023 dan pemerintah kabupaten/kota mendapatkan dana Transfer ke Daerah secara rutin dalam kurun waktu 2021 – 2023. Data yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 111 data.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Arikunto (2010) mendefinisikan sumber data sebagai subjek yang dapat dijadikan sumber informasi. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan atau dokumen historis yang telah terkumpul dalam arsip terbitan (data dokumenter). Dalam penelitian ini sumber data berasal dari Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Timur dan data BPS Jawa Timur rentang tahun 2021 – 2023. Adapun jenis data yang akan diteliti adalah data kuantitatif, yakni data yang dapat diukur secara langsung. Data penelitian yang diambil berupa realisasi Transfer ke Daerah, PAD, dan belanja daerah Provinsi Jawa Timur dalam rentang tahun 2021 – 2023.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik dalam mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi adalah proses pencarian data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, catatan tertulis, angka, serta gambar atau foto yang tersusun sebagai laporan atau deskripsi untuk mendukung penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik Jawa Timur, serta Kementerian Keuangan.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Belanja daerah menjadi variabel dependen penelitian ini. Sementara DAU, DAK, DBH, dan PAD adalah variabel independent. Variabel-variabel tersebut menjadi acuan untuk menentukan keberadaan fenomena *flypaper effect* di Provinsi Jawa Timur. Adapun rinciannya tercantum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel	Sumber
Variabel Dependen				
1	Belanja Daerah	Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam	Belanja Daerah = Belanja Operasi + Belanja Modal + Belanja Tidak	UU No. 1 Tahun 2022

		periode tahun anggaran yang bersangkutan	Terduga + Belanja Transfer	
Variabel Independen				
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah	DAU = Celah Fiskal (CF) CF = Kebutuhan Fiskal – Potensi Pendapatan Daerah	UU No. 1 Tahun 2022
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasional layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah	DAK = DAK Fisik + DAK Nonfisik + Hibah ke Daerah	UU No. 1 Tahun 2022
4	Dana Bagi Hasil (DBH)	DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah	DBH = DBH Pajak + DBH SDA	UU No. 1 Tahun 2022
5	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD Yang Sah	UU No. 1 Tahun 2022

Sumber: Diolah penulis

3.6 Teknik Analisis

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan pemahaman awal mengenai karakteristik data dalam suatu penelitian. Melalui analisis ini, dapat diketahui nilai rata-rata, simpangan baku, nilai tertinggi dan terendah, serta jumlah observasi yang dianalisis (Ghozali, 2016). Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menyajikan gambaran umum mengenai data sampel, sehingga “mempermudah peneliti dalam memahami variabel-variabel yang digunakan dalam studi ini.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah salah satu persyaratan statistik yang harus dipenuhi apabila penelitian menggunakan regresi linier berganda. Lima uji asumsi klasik yang digunakan yakni uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah variabel independen dan dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal. Distribusi yang tidak normal pada data dapat menyebabkan penurunan validitas hasil uji statistik. Salah satu metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas adalah One Sample Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi dari uji ini melebihi 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila

nilai signifikansi berada di bawah 0,05, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi normalitas residual, yaitu melalui analisis grafik dan pengujian statistik (Ghozali, 2016). Salah satu uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan pada uji Kolmogorov-Smirnov Z (*One-Sample K-S*), data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis nol (H_0) diterima. Sebaliknya, jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti data tidak berdistribusi normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan korelasional antar variabel independen. Suatu model regresi yang ideal seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel independennya (Ghozali, 2016). Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas dalam model regresi, antara lain:

- 1) Analisis matriks korelasi antar variabel independen, di mana korelasi yang sangat tinggi (lebih dari 0,95) antara dua atau lebih variabel independen mengindikasikan kemungkinan adanya multikolinieritas.

- 2) Evaluasi nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF), di mana kedua indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana suatu variabel independen dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah mencerminkan tingginya korelasi dengan variabel lain, dan memiliki hubungan terbalik dengan nilai VIF, karena VIF dihitung sebagai kebalikan dari tolerance ($VIF = 1/Tolerance$). Batasan umum yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya multikolinieritas adalah nilai $tolerance \leq 0,10$ atau $VIF \geq 10$.

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016), uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara kesalahan pengganggu (*error term*) pada periode saat ini (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya ($t-1$) dalam model regresi linier. Suatu model regresi dikatakan baik apabila tidak mengandung autokorelasi.

Salah satu metode yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson*. Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji *Durbin-Watson* secara khusus digunakan untuk mendeteksi autokorelasi tingkat pertama (*first-order autocorrelation*), dengan asumsi bahwa model regresi mengandung intersep (konstanta) dan tidak melibatkan variabel lag sebagai bagian dari variabel independen. Pengujian ini didasarkan pada dua hipotesis, yaitu:

- 1) H_0 : Tidak terdapat autokorelasi ($\rho = 0$)
- 2) H_1 : Terdapat autokorelasi ($\rho \neq 0$)

Tabel 3.2 Pengambilan Keputusan Autokorelasi

No	Hipotesis Nol	Jika	Keputusan
1	Terdapat autokorelasi positif	$d < dL$	Ditolak
2	Tidak terdapat autokorelasi positif	$d > dL$	Tidak ditolak
3	Pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan	$dL < d < du$	Tidak ada Kesimpulan
4	Tidak terdapat autokorelasi positif	$d < 4 - du$	Tidak ditolak

Sumber: Ghozali, 2016

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan. Dengan kata lain, pengujian ini digunakan untuk memastikan bahwa nilai residual memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas adalah uji *Glejser* (Ghozali, 2016). Dalam uji ini, prosedurnya dilakukan dengan meregresikan nilai absolut dari residual terhadap variabel independen. Apabila hasil uji menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas.

3.6.3 Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menerapkan metode analisis regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression Model*) dengan menggunakan bantuan perangkat lunak *IBM SPSS Statistics* versi 25 untuk mengolah data dan menguji hipotesis yang diajukan. Analisis ini menghasilkan nilai koefisien untuk masing-masing variabel independen, yang diperoleh melalui proses estimasi terhadap nilai variabel

dependen berdasarkan suatu model persamaan. Model regresi digunakan secara simultan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan. Persamaan yang digunakan dalam analisis dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \alpha_1\beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \mu$$

Y = Belanja Daerah

α = *Intercept* (Konstanta)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = *Slope* (Koefisien Regresi)

X₁ = DAU

X₂ = DAK

X₃ = DBH

X₄ = PAD

μ = *Error* (Variabel Pengganggu)

3.6.3.1 Uji Kelayakan Model

1) Uji-F

Uji F digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian model regresi secara simultan, yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen (X₁, X₂, X₃, X₄) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Pengujian ini dilakukan untuk menilai apakah model regresi yang dibangun layak digunakan dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F didasarkan pada nilai probabilitas (p-value), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai $p\text{-value} > 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak
- 2) Jika nilai $p\text{-value} < 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima

2) Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian terhadap koefisien determinasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Kemampuan tersebut ditunjukkan melalui nilai *Adjusted R Squared* (Ghozali, 2016). Dalam rangka mengidentifikasi keberadaan fenomena *flypaper effect*, terdapat beberapa pendekatan yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya. Salah satunya dijelaskan oleh Cardenas dan Sharma (2011), yang menyediakan acuan dalam bentuk tabel untuk membantu mendeteksi indikasi *flypaper effect*, sebagaimana tertera pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 *Flypaper Effect and Implication*

Condition	Results	Implication
$\beta_1 > \beta_2$ β_1 = Koefisien transfer β_2 = Koefisien <i>income</i>	<i>Flypaper effect</i>	<i>Unconditional transfers increase spending more than an equivalent increase in the private income</i>

Sumber: Cardenas & Sharma (2011)

Berdasarkan data di atas, koefisien pendapatan dalam penelitian ini adalah PAD, sedangkan koefisien transferya adalah TKD. Jika koefisien TKD dibandingkan dengan koefisien PAD, maka akan terlihat fenomena flypaper effect. Koefisien TKD dapat diperoleh dari penjumlahan koefisien DAU, DAK, dan DBH berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh dari uji signifikansi masing-masing parameter (uji t-statistik).

Selain itu, hasil perbandingan nilai presentase *R Square* yang disesuaikan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengaruh relatif TKD dan PAD terhadap belanja daerah. Jika nilai presentase *R Square* uji parsial variabel PAD terhadap belanja daerah lebih kecil dari nilai persentase *R Square* yang disesuaikan uji simultan variabel TKD terhadap belanja daerah, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi *flypaper effect* (Maimunah, 2006).

3.6.3.2 Uji Hipotesis

Uji-t digunakan untuk menguji hipotesis terkait pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini biasanya dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, atau setara dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) (Ghozali, 2016). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji-t adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai signifikansi (*p-value*) lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

- 2) Apabila nilai signifikansi (*p-value*) kurang dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang berarti terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi yang diambil dalam penelitian ini yakni seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. LRA atau Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan data BPS Jawa Timur rentang tahun 2021 – 2023 menjadi sumber dari data sekunder. Dalam rangka menyaring sampel, teknik *purposive sampling* digunakan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Adapun tabel proses pemilihan sampel yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1 Seleksi Kriteria Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Data
1.	Populasi berupa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur	38
Kriteria sampel		
1.	Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang tidak mempublikasikan data keuangan APBD kabupaten/kota dalam kurun waktu 2021 – 2023	(1)
2.	Kabupaten/kota yang tidak mendapatkan Transfer ke Daerah secara rutin dalam kurun waktu 2021 – 2023	(0)
Jumlah sampel kriteria (Populasi – Kriteria sampel)		37
Periode penelitian		3
Total sampel penelitian (Jumlah sampel x periode penelitian)		111

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah populasi penelitian adalah sebanyak 38 kabupaten/kota. Terjadi pengurangan sampel sebanyak 1 kota yang tidak mempublikasikan data keuangan APBD-nya dalam kurun waktu 2021 – 2023

yakni Kota Pasuruan. Jumlah sampel daerah yang digunakan yaitu 111 data yang diperoleh dari jumlah sampel kriteria dikali periode penelitian 3 tahun. Berikut daftar kabupaten/kota yang menjadi sampel pada penelitian ini:

Tabel 4.2 Daftar Sampel

No.	Nama Daerah	Jenis Daerah
1.	Pacitan	Kabupaten
2.	Ponorogo	Kabupaten
3.	Trenggalek	Kabupaten
4.	Tulungagung	Kabupaten
5.	Blitar	Kabupaten/Kota
6.	Kediri	Kabupaten/Kota
7.	Malang	Kabupaten/Kota
8.	Lumajang	Kabupaten
9.	Jember	Kabupaten
10.	Banyuwangi	Kabupaten
11.	Bondowoso	Kabupaten
12.	Situbondo	Kabupaten
13.	Probolinggo	Kabupaten/Kota
14.	Pasuruan	Kabupaten
15.	Sidoarjo	Kabupaten
16.	Mojokerto	Kabupaten/Kota
17.	Jombang	Kabupaten
18.	Nganjuk	Kabupaten
19.	Madiun	Kabupaten/Kota
20.	Magetan	Kabupaten
21.	Ngawi	Kabupaten
22.	Bojonegoro	Kabupaten
23.	Tuban	Kabupaten
24.	Lamongan	Kabupaten
25.	Gresik	Kabupaten
26.	Bangkalan	Kabupaten
27.	Sampang	Kabupaten
28.	Pamekasan	Kabupaten
29.	Sumenep	Kabupaten
30.	Surabaya	Kota
31.	Batu	Kota

Sumber: Diolah penulis

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini bertujuan dalam memberi gambaran umum dari nilai minimal, maksimal, rata-rata, dan standar deviasi dari data penelitian. Variabel independen di ini adalah DAU, DAK, DBH, dan PAD, sedangkan variabel dependen di sini yakni Belanja Daerah dengan total sampel sebanyak 111 data. Berikut merupakan analisis untuk setiap variabel.

Tabel 4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	111	132114300040	1704938164985	909547522317.77	293841621673.092
DAK	111	64513442315	765020063810	327461512858.30	145474180137.410
DBH	111	67101573892	3120268981128	275915912730.57	500216543013.690
PAD	111	112144295209	5771818530453	608931025648.22	853279701945.181
BD	111	5070127528	9543590902935	2542013812984.69	1465171763290.991
Valid N (listwise)	111				

Sumber: Olah data SPSS

Berdasarkan tabel 4.3, data variabel DAU menunjukkan nilai minimum sebesar 132.114.300.040, nilai maksimum sebesar 1.704.938.164.985, rata-rata sebesar 909.547.522.317,77 dan standar deviasi sebesar 293.841.621.673,092. Artinya, rata-rata kabupaten/kota yang diteliti mendapatkan DAU sebesar 909.547.522.317,77. Selain itu standar deviasi jauh lebih kecil daripada rata-rata, menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang kecil atau cenderung homogen.

Data variabel DAK menunjukkan bahwa kabupaten/kota mendapatkan rata-rata DAK sebesar 327.461.512.858,30, dengan nilai minimum sebesar

64.513.442.315 dan nilai maksimum sebesar 765.020.063.810. Standar deviasi sebesar 145.474.180.137,410, standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa variasi data rendah dan persebaran data merata.

Data variabel DBH menunjukkan bahwa nilai minimumnya sebesar 67.101.573.892, nilai maksimum sebesar 312.026.898.1128, nilai rata-ratanya sebesar 275.915.912.730,57, serta standar deviasinya sebesar 500.216.543.013,690. Standar deviasi yang lebih besar daripada rata-rata menunjukkan bahwa data memiliki sebaran yang luas atau tidak homogen. Artinya, terdapat banyak variasi dalam data tersebut. Hal ini karena DBH bergantung kepada seberapa besar sebuah daerah mampu menghasilkan pajak/kekayaan bukan pajak.

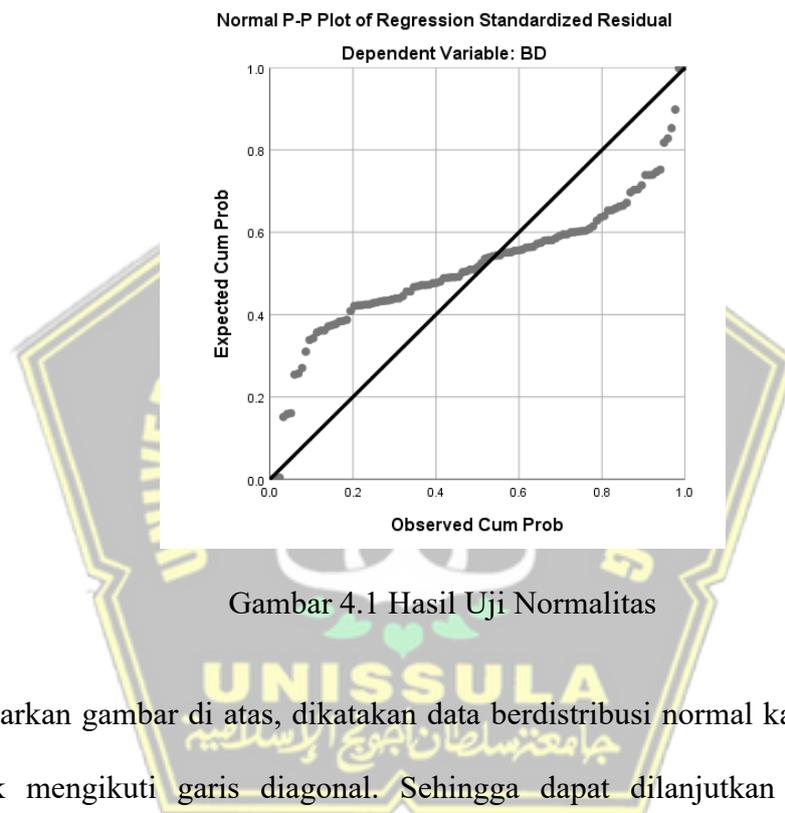
Berdasarkan tabel 4.3, data variabel PAD memiliki nilai minimum sebesar 112.144.295.209, nilai maksimum sebesar 5.771.818.530.453, rata-rata sebesar 608.931.025.648,22, dan standar deviasi sebesar 853.279.701.945,181. PAD memiliki sebaran data yang luas atau variatif, ditunjukkan oleh standar deviasi yang lebih besar daripada rata-rata. Pada prakteknya, PAD kabupaten/kota di Jawa Timur bervariasi, karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda dalam memaksimalkan PAD-nya.

Sementara itu, data variabel independent BD atau Belanja Daerah memiliki nilai minimum sebesar 5.070.127.528, nilai maksimum sebesar 9.543.590.902.935, rata-rata sebesar 2.542.013.812.984,69, dan standar deviasi sebesar 1.465.171.763.290,991. Belanja daerah pada penelitian ini memiliki persebaran data yang merata karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan tes *Probability Plot* sebagai uji normalitas. Data dikatakan berdistribusi normal apabila data tampak mengikuti garis diagonal. Hasil tes dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar di atas, dikatakan data berdistribusi normal karena titik-titik tampak mengikuti garis diagonal. Sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah ditemukan korelasi antarvariabel independen pada model regresi. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	135779797497.440	162091317866.053		.838	.404		
	DAU	1.013	.278	.203	3.647	.000	.353	2.830
	DAK	2.156	.618	.214	3.487	.001	.291	3.435
	DBH	.263	.100	.090	2.632	.010	.946	1.058
	PAD	1.160	.068	.675	17.134	.000	.706	1.417

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Olah data SPSS

Berdasarkan tabel 4.6, variabel DAU memiliki nilai tolerance 0,353 dan nilai VIF 2,83. Variabel DAK memiliki nilai tolerance 0,353 dan nilai VIF 3,435. Variabel DBH memiliki nilai tolerance 0,946 dan nilai VIF 1,058. Variabel PAD memiliki nilai tolerance 0,706 dan nilai VIF 1,417. Keempat variabel tersebut memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , yang dapat diartikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antarvariabel bebas sehingga dapat melanjutkan uji selanjutnya.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) pada regresi linear. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji yang dapat dilakukan adalah uji *durbin – Watson*, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.940 ^a	.884	.879	508958780412	2.102 .099

a. Predictors: (Constant), PAD, DBH, DAU, DAK

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Olah data SPSS

Uji Durbin-Watson memiliki persamaan sebagai berikut:

$$du < \text{Durbin Watson} < 4-du$$

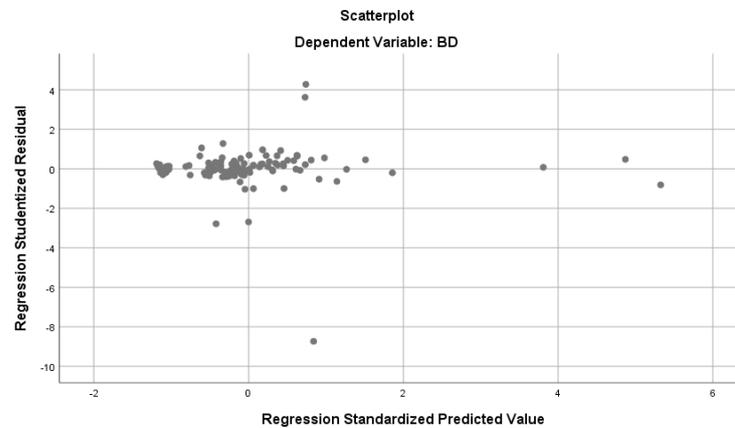
Nilai *du* didapat dengan melihat tabel durbin Watson dengan nilai $k(4)$ dan $N(111)$. Nilai k menunjukkan banyaknya variabel independen dan nilai N menunjukkan jumlah sampel. Berdasarkan tabel 4.7, nilai Durbin-Watson adalah 2,102. Setelah melihat tabel Durbin-Watson level signifikansi $\alpha = 0,05$, didapat persamaan sebagai berikut:

$$du (1,7657) < \text{Durbin Watson} (2,102) < 4-du (2,2343)$$

Karena nilai Durbin-Watson tersebut masih berada dalam rentang yang sesuai, maka diartikan bahwa data memenuhi syarat karena tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan tes *Scatterplot* sebagai uji heterokedastisitas. Data dikatakan tidak ada gejala heterokedastisitas apabila data titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil tes dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar di atas, tidak ditemukan gejala heterokedastisitas karena titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

4.2.3 Regresi Linier Berganda

4.2.3.1 Uji Kelayakan Model

1) Uji F

Syarat uji F dapat dilihat melalui nilai signifikansi. Apabila signifikan $< 0,05$ dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis diterima. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	20868197429716666000000000.000	4	52170493574291665000000000.000	201.400	.000 ^b
Residual	27458138256808560000000000.000	106	259039040158571300000000.000		
Total	236140112553975230000000000.000	110			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), PAD, DBH, DAU, DAK

Sumber: Data yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 1, diketahui nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} (201,4) > F_{tabel} (2,45)$, maka hipotesis diterima. Artinya, DAU, DAK, DBH, dan PAD secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

2) Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.940 ^a	.884	.879	508958780412.099	2.102

a. Predictors: (Constant), PAD, DBH, DAU, DAK

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Data yang diolah, 2025

Nilai koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai tersebut berkisar antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu artinya variabel independen (X) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Y).

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai adjusted R Square adalah sebesar 0,879. Artinya, pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 87,9%.

4.2.3.2 Uji Hipotesis

1) Uji-t

Hasil pengujian analisis linier berganda pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa DAU, DAK, DBH, dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Keempat variabel menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$. Dengan demikian, H_1 , H_2 , H_3 , dan H_4 yang menyatakan bahwa DAU, DAK, DBH, dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah **diterima**.

Tabel 4.8 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	135779797497.440	162091317866.053		.838	.404
DAU	1.013	.278	.203	3.647	.000
DAK	2.156	.618	.214	3.487	.001
DBH	.263	.100	.090	2.632	.010
PAD	1.160	.068	.675	17.134	.000

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Data yang diolah, 2025

Sementara itu dalam rangka mengidentifikasi fenomena *flypaper effect*, beberapa peneliti menggunakan cara yang berbeda. Salah satunya dengan menggunakan tabel perbandingan antara koefisien TKD dan PAD terhadap belanja daerah (Cardenas dan Sharma, 2011), sebagai berikut:

Tabel 4.9 Flypaper Effect dan Implikasinya

Kondisi	Perbandingan	Hasil	Implikasi
$\beta_1 > \beta_2$	$3,432 > 1,160$	<i>Flypaper effect</i>	TKD
$\beta_1 =$ Koefisien transfer (DAU+DAK+DBH)	TKD = 3,432		meningkatkan belanja daerah lebih besar daripada kenaikan setara dalam PAD.
$\beta_2 =$ Koefisien pendapatan (PAD)	PAD = 1,160		

Sumber: Data yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji t, koefisien TKD dapat diperoleh dari penjumlahan koefisien DAU, DAK dan DBH sebesar 3,432, sedangkan koefisien PAD sebesar 1,160. Berdasarkan hal tersebut, didapatkan hasil bahwa TKD dan PAD berpengaruh positif dengan nilai koefisien TKD lebih besar daripada PAD, sebagaimana tersaji dalam tabel. Dengan demikian, H_5 yang menyatakan bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* di Provinsi Jawa Timur **diterima**.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 DAU terhadap Belanja Daerah

Variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Artinya, semakin besar nilai DAU, maka semakin besar belanja daerah. Hal ini dikarenakan DAU yang diperoleh oleh pemerintah daerah menunjukkan tingkat kemandirian di daerah tersebut (UU No. 1 Tahun 2022; Hairiyah *et al.*, 2017). Sejalan dengan teori *stewardship*, bahwa peran pemerintah daerah tidak sekadar menerima DAU saja, melainkan menggunakannya sebagai katalis pembangunan menuju kemandirian. *Steward* harus kritis dalam mentransformasi ketergantungan, dimana pemerintah daerah sebagai pengelola harus mengoptimalkan penggunaan DAU ini demi kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Meiriana, *et al.* (2024), Fahrizal & Sukartini (2024), Fadilah & Helmayunita (2020), Tribudhi, *et al.* (2020), Indrasari & Kholvieyana (2020), Muthmainah & Wakhid (2018), Yulina, *et al.* (2017), Lestari *et al.* (2016), Amalia, *et al.* (2015), Nurdini *et al.* (2015), serta

Santoso *et al.* (2015). yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

4.3.2 DAK terhadap Belanja Daerah

Variabel DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin tinggi nilai DAK, maka belanja daerah juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan semakin besarnya nilai DAK yang diterima dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah memiliki dana lebih dalam melakukan pengeluaran melalui belanja daerah. DAK diberikan kepada suatu daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan tertentu daerah sesuai dengan petunjuk juknisnya dan disesuaikan dengan prioritas nasional serta bersumber dari pendapatan APBN.

Sejalan dengan *teori stewardship*, peran pemerintah daerah disini harus mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program lokal serta mengoptimalkan alokasi dana sesuai kebutuhan strategis. DAK bukan sekadar mekanisme transfer dana, melainkan instrumen strategis pembangunan daerah yang harus diterapkan secara transformatif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

Hasil penelitian ini serupa dengan temuan Meiriana, *et al.* (2024), Muthmainah & Wakhid (2018), Yulina, *et. al.* (2017), serta Amalia *et al.* (2015), yang memberikan simpulan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan Fadilah & Helmayunita (2020) dan Nurdini *et al.* (2014), yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap belanja daerah.

4.3.3 DBH terhadap Belanja Daerah

Variabel DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan semakin besarnya nilai DBH yang diterima dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah memiliki dana lebih dalam melakukan pengeluaran melalui belanja daerah. DBH diberikan kepada daerah penghasil dengan alokasi yang ditentukan dengan formulasi persentase tertentu dan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Merujuk teori *stewardship*, peran pemerintah daerah sebagai *steward* disini adalah untuk mengoptimalkan kekayaan dan sumber daya yang dimiliki demi kepuasan bersama. *Steward* tidak hanya menerima dan menggunakan DBH, tetapi mentransformasikannya menjadi modal pembangunan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Muthmainah & Wakhid (2018), Yulina, *et al.* (2017), serta Nurdini *et al.* (2015), yang memberikan simpulan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Di sisi lain, Santoso *et al.* (2015) menghasilkan simpulan bahwa DBH berpengaruh negatif terhadap belanja daerah.

4.3.4 PAD terhadap Belanja Daerah

Variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Karena PAD adalah salah satu komponen biaya belanja daerah, hal ini mengindikasikan bahwa apabila tingkat PAD tinggi maka belanja daerah juga tinggi dikarenakan kebutuhan

belanja daerah yang semakin meningkat. Kemandirian dalam suatu daerah dapat dilihat melalui tingginya tingkat PAD yang diperoleh pemerintah daerah. Apabila tingkat PAD yang diterima semakin tinggi maka semakin besar kemungkinan daerah tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri dan tidak bergantung dengan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah tersebut bisa dikatakan daerah otonom (Hairiyah *et al.*, 2017).

Sejalan dengan teori *stewardship*, disini peran *steward* harus mampu memaksimalkan potensi dan inovasi untuk meningkatkan PAD. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana dari pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak sekedar mengelola pendapatan, tetapi membangun ekosistem pembangunan mandiri yang berkelanjutan.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Wahab (2020), Muthmainah dan Wakhid (2018), Urip dan Indahyani (2017), serta Lestari, *et al.* (2016), yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

4.3.5 Flypaper Effect pada Belanja Daerah di Jawa Timur

Berdasarkan penelitian, didapat hasil bahwa terjadi flypaper effect di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh dari uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), koefisien dana perimbangan dapat diperoleh dari penjumlahan koefisien DAU, DAK dan DBH yaitu sebesar 3,432, sedangkan nilai koefisien PAD adalah 1,160. Artinya, pemerintah daerah lebih bergantung kepada TKD daripada PAD untuk membiayai belanja daerahnya. *Flypaper effect*

merupakan kondisi yang menunjukkan belanja daerah lebih bergantung terhadap TKD daripada PAD. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di beberapa negara lain seperti Meksiko (Cardenas & Sharma, 2011). *Flypaper effect* membawa implikasi yakni adanya kecenderungan untuk menanti bantuan dari pusat dibanding mengelola sumber daya daerah sendiri.

Hubungan teori *stewardship* dalam hal ini adalah terkait peran *steward* sebagai pengelola keuangan, yang seharusnya tidak hanya sekadar penerima transfer, namun juga bisa memaksimalkan PAD. Hal ini akan merubah paradigma di mana belanja daerah tidak lagi dipandang sebagai realisasi atas bantuan, tetapi sebagai instrumen strategis pemberdayaan dan bentuk kemandirian.

Penelitian ini sejalan dengan hasil temuan Fadilah dan Helmayunita, 2020, Tribudhi, *et al.* (2020), Indrasari & Kholvieyana (2020), Muthmainah & Wakhid (2018), Yulina, *et al.* (2017), Amalia, *et al.* (2015), Nurdini *et al.* (2015), serta Santoso *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa terjadi fenomena flypaper effect pada daerah yang diteliti. Sementara itu, berbeda dengan Fahrizal dan Sukartini (2024) menyatakan bahwa *flypaper effect* tidak terjadi pada belanja daerah di Provinsi Aceh.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis regresi berganda yang telah dilakukan, variabel DAU, DAK, DBH, dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 2021 – 2023. Adapun hasil pengujian selanjutnya, ditemukan bahwa masih terjadi fenomena *flypaper effect* di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah lebih banyak menggunakan Transfer ke Daerah (DAU, DAK dan DBH) dibandingkan dengan PAD dalam melaksanakan belanja daerahnya. Artinya, pemerintah Provinsi Jawa Timur masih memiliki kecenderungan untuk bergantung kepada pemerintah pusat, padahal setiap daerah memiliki otonomi untuk mengelola sumber dayanya sendiri.

5.2 Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu refesensi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah.
- 2) Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengharuskan setiap daerah di Provinsi harus memperkuat penerimaan dari PAD dan Pendapatan Daerah Lainnya, dengan begitu TKD tidak menjadi sumber utama dalam melakukan belanja daerah. Disisi lain, memprioritaskan

PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kemandirian daerah dapat tercapai.

- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan transparansi terkait penggunaan Transfer ke Daerah (DAU, DAK, DBH) dan PAD terhadap belanja daerah serta fenomena *flypaper effect* di Provinsi Jawa Timur.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain waktu yang digunakan hanya terbatas pada tahun 2021 – 2023, sehingga belum mencerminkan hasil secara menyeluruh. Mengingat Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kemampuan daerah yang berbeda-beda, data yang didapatkan belum mengklasifikasikan daerah dalam kriteria tertentu, misalnya antara daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi atau rendah, sehingga hasil yang diberikan masih secara umum dan tidak mencerminkan fenomena di masing-masing daerah.

5.4 Agenda yang akan Datang

Tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian dapat dilakukan dalam skala yang lebih kecil di kabupaten/kota yang memiliki dana transfer atau PAD yang minim. Meskipun datanya tidak lebih luas, namun data tersebut berpeluang lebih akurat dan lebih sesuai dengan realita, sehingga dapat dijadikan acuan untuk objek penelitian serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Richard & Tommasi, Danniell. (2001). *Managing Public Expenditure : A Reference Book for Transition Countries*. Paris: OECD.
- Amalia, W. R., Nor, W. & Nordiansyah, M. (2015). Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2009-2013. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15(1). 1–12.
- Armawaddin, M. (2015). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18 (8), 13–19.
- Cardenas, O. J., & Sharma, A. (2011). Mexican municipalities and the Flypaper Effect. *Journal of Economic Literature*, 77, 1–16.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward A Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144–3159.
- Fahrizal, M., & Sukartini, N. (2024). Flypaper Effect Dana Otonomi Khusus dan Dana Perimbangan pada Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1203–1214.
- Felix, O. (2012). Analysis of the Effectiveness of Capital Expenditure Budgeting in the Local Government System of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*, 4 (1), 1–6.
- Friyani. (2017). Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi)*, 5(2), 101–104.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hairiyah, Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap Belanja Modal. *Kinerja*, 14(2), 85–91.
- Harefa, Mandala, Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indrasari, A., & Kholvieyana, R. (2021). Flypaper Effect dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 8(2), 1–13.
- Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur. (2020). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2023*. Surabaya. 102 hlm.
- Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur. (2024). *Press Release APBN Regional Jawa Timur s.d. 31 Januari 2024*. Diakses pada 15 November 2024, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim/id/data-publikasi/press-release/>.
- Lestari, A., Dali, N., & Abdullah, M. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 44–55.
- Maimunah, M. (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi IX*, 11(1), 1–27.
- Meiriana, A. Z., Kusumaningtyas, S. A., & Pangestuti, A. L. (2024). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur 2016 – 2022. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 1(2), 49–67.
- Muthmainah & Wakhid, A. (2018). Fenomena Flypaper Effect atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Bali dan Nusra. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 151–163.
- Nurdini, R., Wiratno, A., & Farida, Y. N. (2015). Analisis Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *JAKA (Jurnal Akuntansi dan Keuangan): Research, Invent, Solve and Share*, 2(1), 80–94.

- Pemerintah Indonesia. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rahmat. (2011). *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santoso, I., Suparta, I.W., dan Saimul. (2015). Flypaper Effect pada pengelolaan keuangan daerah di provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4 (2), 135–166.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. 7th Edition*. West Sussex: Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tribudhi, D. A., Hariyanti, D., Rustam, R., Syofyan, S., & Trisakti, U. (2020). Flypaper Effect on Regional Spending in Central Java. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(4), 1053–1059.
- Urip, T. P., & Indahyani, R. (2017). Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(2), 9–21.
- Wahab, L. O. A W. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 89–14.
- Walidi. (2009). Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Yulina, B., Sari, K. R., Martini, R., Dewi, H. H. S., & Safitri, K. A. (2017). Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(2), 89–96.